

Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman Pakujoyo terhadap Kondisi Sosial Ekonomi

The Impact of Street-Vendor Arrangement at Pakujoyo Park on Socio-Economic Conditions

Muhammad Arya Persada^{1*}, Rosyidah Fatmawati¹, Murtanti Jani Rahayu^{1,2}

¹Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

²Pusat Informasi dan Pengembangan Wilayah (PIPW), LPPM Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

*Penulis korespondensi. e-mail: muhammadaryapersada@student.uns.ac.id

(Diterima: 24 Desember 2022; Disetujui: 20 Maret 2023)

Abstrak

Merebaknya sektor informal hingga kini tidak dapat terlepas dari fenomena industrialisasi dan urbanisasi di perkotaan. Salah satu penyebab munculnya sektor informal perkotaan adalah ketika proses pembangunan tidak dapat menyediakan cukup peluang kerja bagi semua angkatan kerja. Di sisi lain, selain memberikan dampak positif dengan penyediaan lapangan pekerjaannya, munculnya Pedagang Kaki Lima (PKL) menciptakan permasalahan-permasalahan lain. PKL dapat dilihat sebagai salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi masyarakat dari yang umumnya ditimbulkan oleh proses urbanisasi. PKL di Taman Pakujoyo, Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu kasus yang mencerminkan fenomena ini. Taman Pakujoyo pada awalnya dibangun untuk menjadi taman kota, yang kemudian menjadi magnet bagi pedagang sebagai lokasi untuk berjualan sehingga sektor informal berkembang di Taman Pakujoyo. Meski telah tertibkan dan ditata oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, beberapa masalah tetap belum terselesaikan dengan program penataan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak penataan PKL di Taman Pakujoyo, terutama dampaknya pada aspek kondisi sosial ekonomi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa program penataan yang terjadi memberikan dampak secara ekonomi dengan meningkatnya pendapatan PKL dan secara sosial mendorong terbentuknya Paguyuban PKL.

Kata kunci: pedagang kaki lima; penataan; Taman Pakujoyo

Abstract

The spread of the informal sector have not been able to be separated from the emergence of the phenomenon of industrialization and urbanization in urban areas. One of the causes of the emergence of the urban informal sector is when the development process could not able to provide job opportunities for all of the workforce. However, in addition to having a positive impact by providing jobs, the emergence of street vendors creates other problems. Street vendors can be seen as one of the efforts in overcoming socio-economic problems of the community that are caused commonly by urbanization. Street vendors in Pakujoyo Park, Sukoharjo Regency is one case that reflects this phenomenon. Pakujoyo Park was originally developed to be a city park but later became a magnet for street vendors to settle, thus the informal sector started to develop in Pakujoyo Park. Although has been managed and organized by the Sukoharjo Regency Government, a number of problems remain unresolved through the street vendor arrangement program. Therefore, this study aims to see the impact of street vendor arrangement in Pakujoyo Park, especially from the aspect of its socio-economic conditions. This study used qualitative descriptive analysis techniques to analyze the collected primary data. The results show that the arrangement program implemented had an economic impact by increasing the income of street vendors and socially encouraged the formation of street vendor group.

Keywords: arrangement, Pakujoyo Park; street vendor

1. PENDAHULUAN

Merebaknya sektor informal hingga kini tidak bisa dipisahkan dari timbulnya fenomena urbanisasi dan industrialisasi yang timbul di perkotaan (Manning & Effendi, 1995). Salah satu pemicu adanya fenomena urbanisasi adalah semakin berkembangnya kawasan perkotaan, baik dari segi fisik maupun ketersediaan lapangan pekerjaan. Kawasan perkotaan ini juga menjadi wadah konsentrasi permukiman penduduk dari berbagai kegiatan ekonomi dan sosial serta mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat (Rusito, Suaib, & Hidayat, 2017). Terjadinya industrialisasi yang

diawali adanya pembangunan dengan mengedepankan kawasan perkotaan atau *urban bias* telah mengakibatkan jarak kesenjangan yang melebar antara kondisi perekonomian di perkotaan dan perdesaan. Kebanyakan negara yang sedang berkembang meninggalkan sektor pertanian di perdesaan untuk mendapatkan sumber daya dalam upaya menumbuhkembangkan sektor industri dan urbanisasi. Menurut McGee dan Todaro dalam Effendi (1993), urbanisasi di negara yang sedang berkembang atau dunia ketiga tidak diikuti oleh adanya penambahan fasilitas perkotaan, ketersediaan lapangan kerja, dan kemampuan sektor formal menyerap tenaga kerja. Tidak adanya hal-hal tersebut menimbulkan titik-titik miskin di kawasan perkotaan dan menimbulkan adanya nilai sosial yang mengarah kepada budaya kemiskinan dikarenakan adanya ketimpangan ekonomi dan sosial di perkotaan daripada proses kemiskinan yang muncul di perdesaan. Bukan tidak mungkin fenomena yang terjadi ini hanya merupakan perpindahan kemiskinan yang berada di perdesaan ke perkotaan. Kebudayaan kemiskinan atau proses ini terjadi di luar ketentuan formal yang ditetapkan dalam rencana pembangunan. Proses tersebutlah yang menyebabkan munculnya sektor informal.

Dinamika sektor informal di Indonesia saat ini tidak terlepas dari proses serta paradigma pembangunan yang selama ini dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi yang pada awalnya diunggulkan sebagai pertumbuhan makro justru menimbulkan adanya kesenjangan sosial. Pada saat itulah sektor informal berkembang dan berperan. Sektor informal dengan berbagai kekurangan dan dampak negatif yang ditimbulkan mampu berkembang dan berperan sebagai salah satu solusi alternatif peluang kerja bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan untuk mengatasi permasalahan ekonomi, mengingat bahwa setiap masyarakat membutuhkan sebuah lapangan pekerjaan. Hart (1973) memperkenalkan sektor informal sebagai angkatan kerja kota yang berada di luar pasar tenaga kerja. Berkembangnya sektor informal tentu memberikan dampak positif terhadap perekonomian maupun kehidupan sosial masyarakat, terutama masyarakat dari kalangan menengah ke bawah atau para pendatang yang tidak tertampung dalam kegiatan ekonomi formal (Soleh & Daniel, 2019). Disamping dampak positifnya, kemunculan sektor informal menimbulkan permasalahan lain yaitu sulitnya pengendalian sektor informal melalui peraturan. Begitu juga terhadap usaha-usaha yang muncul dari kelompok yang terpinggirkan, masyarakat dari kalangan menengah ke bawah, atau para pendatang untuk memenuhi kebutuhannya.

Adanya perkembangan sektor informal di kawasan perkotaan merupakan salah satu usaha dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Salah satu contoh sektor informal adalah Pedagang Kaki Lima atau disebut PKL. Selain memberikan dampak positif melalui penyediaan lapangan kerja, tidak dapat dipungkiri bahwa munculnya PKL menciptakan permasalahan-permasalahan lain. PKL diakui sebagai bagian dinamika perekonomian perkotaan tetapi juga sekaligus mengundang berbagai tantangan baru. Pada umumnya sektor informal tidak bekerja dalam sistem ekonomi yang terorganisir sehingga keberadaannya tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak atau retribusi daerah. Sektor informal juga berpotensi melahirkan kriminalitas karena sering beroperasi di wilayah-wilayah terlarang. Selain itu, sektor informal cenderung merusak keindahan kota karena tidak tertata dan seringkali menempati ruang publik yang bukan peruntukannya (Budiman, 2010; Soleh & Daniel, 2019). Berdasarkan pengamatan terhadap adanya sebuah kebijakan di kawasan perkotaan terhadap PKL selama ini, ada beberapa alasan yang membuat banyak pemerintah kota gagal mengelolanya agar tertata dengan baik. Alasan yang pertama adalah sikap dan perspektif yang saling bertentangan. Pada satu sisi, keberadaan PKL dianggap sebagai salah satu upaya untuk menambah lapangan kerja, memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan barang dengan harga murah, menambah daya tarik kawasan perkotaan, dan membuat kota menjadi lebih hidup. Namun di sisi lain, PKL juga dianggap sebagai penyebab yang membuat kota menjadi tidak tertata dan terkesan kotor. Menurut Banks, Lombard, & Mitlin (2020), informalitas sendiri sering dipahami sebagai dikotomi yang banyak dikritik. Di satu sisi, informalitas dipandang sebagai masalah realitas yang tidak diatur dan tidak direncanakan yang harus disikapi melalui regulasi. Namun di sisi lain, informalitas dianggap sebagai perayaan kegigihan kelompok-kelompok terpinggirkan yang berada di tengah-tengah sosial, ekonomi, politik, dan pengecualian geografis untuk mempertahankan hidupnya.

Tidak dapat dibantah bahwa PKL dapat dilihat sebagai salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi masyarakat baik dari yang ditimbulkan oleh adanya urbanisasi maupun kegiatan lainnya. Kondisi yang serupa juga terjadi di Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu daerah dengan PKL yang berkembang cukup pesat beberapa tahun terakhir, salah satunya yaitu adanya perkembangan PKL di Kawasan Perkotaan Sukoharjo yang berada di Area Taman Pakujoyo. Melalui penelitian ini, penulis ingin melihat bagaimana perkembangan sektor informal, khususnya PKL di Kabupaten Sukoharjo, terutama dilihat dari kondisi sosial ekonominya. Diketahui pula bahwa penataan di Taman Pakujoyo baru berjalan dalam tiga tahun terakhir. Oleh karena itu, perlu diketahui dampak dari penataan PKL ini terhadap kondisi sosial ekonominya agar kita mengetahui apakah penataan PKL ini sudah tepat sasaran atau belum, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi tindak lanjut.

2. KAJIAN TEORI

2.1 PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)

Pedagang Kaki Lima atau PKL merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal di kawasan perkotaan. Jumlah PKL beragam, bahkan seringkali lebih banyak jika dibandingkan dengan usaha sektor informal yang lain. Secara arti maupun bahasa, pedagang merupakan sebutan seseorang yang memiliki kegiatan pekerjaan menjual dan membeli. Pedagang merupakan orang yang melakukan kegiatan usaha dengan melakukan pembelian barang untuk kemudian menjualnya kembali untuk mengambil sebuah hasil untung dari barang telah dijual. Kaki lima memiliki arti sebagai lokasi saat melakukan dagang yang tidak tetap atau tidak permanen. Berdasar sejarah, istilah Pedagang Kaki Lima berasal dari masa penjajahan Belanda, tepatnya pada zaman pemerintahan Raffles, dimana jalur trotoar atau pejalan kaki memiliki lebar 5 kaki atau sekitar 1.5 meter sehingga penjaja atau penjual yang berada di jalur trotoar disebut sebagai pedagang kaki lima (Saputra & Indrawati, 2014). Menurut Budiman (2010), PKL merupakan istilah untuk menyebut penjaja atau penjual dagangan yang menggunakan gerobak atau penjual dagangan di jalanan. Sedangkan menurut Damsar dalam Saputra (2014), PKL adalah penjaja atau penjual yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Dari uraian diatas, dapat diartikan bahwa PKL adalah penjaja/penjual/pedagang yang tidak mempunyai lokasi dagang atau usaha tetap/permanen.

Banyak masyarakat memilih untuk menjadi PKL karena mudah dijadikan sebagai lapangan kerja, terutama bagi masyarakat dengan strata ekonomi rendah di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, khususnya pada kawasan perkotaan, baik kota besar maupun kecil (Jayadinata dalam Rusito et al., 2017). Selain itu, PKL merupakan pilihan alternatif karena minim tekanan dari sistem ekonomi yang tidak memberi tempat bagi masyarakat yang tidak mempunyai pendidikan, keterampilan yang mencukupi atau memiliki keterbatasan (Rachbini & Hamid, 1994). Keterbatasan ini meliputi keterbatasan tingkat pendidikan, keterbatasan kemampuan ekonomi atau keterbatasan modal, serta keterbatasan penguasaan pengetahuan dalam tatanan atau peraturan yang berlaku. Keterbatasan tersebut membuat masyarakat ekonomi lemah berusaha dalam bentuk usaha dagang berupa PKL untuk memenuhi kebutuhan hidup (Faradina, 2019).

2.2 DAMPAK SOSIAL EKONOMI

Dampak sosial ekonomi bisa diamati melalui dua sisi, yakni sisi negatif maupun sisi positif, sehingga dapat dinilai dengan perspektif yang seimbang. Berbagai contoh sisi positif dampak sosial ekonomi yang bisa diambil antara lain kenyamanan usaha dan meningkatnya kelayakan dalam berdagang, penambahan lapangan pekerjaan, adanya perubahan status pada para pedagang seperti dari ilegal menjadi legal atau sah menurut peraturan yang ada (Sinaga, 2004). Menurut pendapat dari Djodjodipuro (1992), dampak yang ditimbulkan dari aktivitas sosial ekonomi ialah berubahnya sifat yang terjadi pada masyarakat disebabkan oleh adanya kegiatan pembangunan yang mempengaruhi berbagai hal seperti adanya kesempatan usaha, perubahan pendapatan, dan adanya penyerapan pekerja. Dampak dari kegiatan sosial ekonomi berada pada sistem ekonomi yang terkait dengan struktur dan kondisi ekonomi. Menurut Soleh & Daniel (2019), dampak positif adanya PKL antara lain terbukanya peluang usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak tertampung dalam kegiatan ekonomi formal, aktivitas ekonomi meningkat karena sektor informal. PKL tidak hanya menjadi penjual, tetapi sekaligus mengkonsumsi hasil-hasil produksi sektor formal. Sedangkan menurut Saputra & Indrawati (2014), PKL memiliki dampak positif seperti memberikan peluang kerja, berkontribusi dalam mengurangi pengangguran, dan meningkatkan harapan perkembangan usaha bagi masyarakat kecil atau terpinggirkan di wilayah perkotaan.

Dampak negatif adanya PKL menurut Sinaga (2004) meliputi menurunnya kualitas sosial atau hidup para pedagang dalam melakukan aktivitas kegiatan sosial, dapat menurunkan pendapatan pedagang formal, dan menurunkan kesempatan bagi para pedagang dalam turut serta di kelompok-kelompok sosial nonformal. Menurut Soleh & Daniel (2019), dampak negatif PKL antara lain PKL umumnya tidak bekerja dalam sistem ekonomi yang terorganisir sehingga keberadaannya tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak/retribusi daerah, sektor informal dapat melahirkan kriminalitas karena mereka umumnya beroperasi di wilayah-wilayah terlarang dan membutuhkan perlindungan preman, cenderung merusak keindahan kota karena tidak tertata rapi yang berkaitan dengan sifat PKL yang sulit ditata dan diatur. Selain itu, pemerintah juga perlu mengeluarkan biaya lebih untuk menyediakan sarana dan prasarana sosial serta keamanan mereka. Menurut Budiman (2010) dampak negatif PKL berkaitan dengan penurunan kualitas lingkungan karena menempati ruang publik yang bukan peruntukannya seperti di trotoar dan bahu jalan, penurunan kualitas lingkungan akibat sampah yang dihasilkan, menyebabkan kemacetan lalu lintas di pinggir jalan, dan pencemaran udara.

Berdasarkan sintesis teori tersebut, didapatkan indikator dari penataan PKL yang menurut Sutrisno, Suwandi, & Sundari (2007) yang dijelaskan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Variabel dan Indikator dalam Penelitian

Variabel	Indikator
Dampak sosial	Adanya penyuluhan mengenai tempat usaha, waktu usaha, maupun mengenai sarana usaha Adanya penyuluhan non fisik dan pengaturan seperti bertanggung jawab atas ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan, dan keamanan tempat usaha
Dampak ekonomi	Ada jaminan perlindungan bagi para PKL Adanya pembinaan PKL Kondisi yang kondusif oleh seluruh elemen masyarakat Adanya pengembangan kemampuan manajerial PKL yang baik Adanya kerja sama dalam permodalan Adanya kerja sama kemitraan <i>stakeholder</i> terkait ataupun pemerintah dengan para PKL

Kondisi sosial ekonomi dapat ditandai dengan adanya saling mengenal antara satu sama lain, adanya penyuluhan, paguyuban, sifat kegotongroyongan, dan kekeluargaan (Lausiry & Tumuka, 2019). Berdasarkan segi sosial, sebagian besar PKL mempunyai karakteristik berpendidikan rendah, cenderung tidak memiliki keahlian, dan merupakan pendatang yang bermigrasi ke kawasan perkotaan. Dari sisi ekonomi, menurut Bromley (1979), kegiatan ekonomi formal dan informal merupakan kegiatan yang tidak dapat terpisahkan, akan selalu berinteraksi. Maka dari itu, sokongan dari pemerintah untuk dua sektor tersebut haruslah berimbang dan tetap membawa kondisi yang adil bagi usaha kecil.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sukoharjo dengan PKL di Taman Pakujoyo sebagai objek penelitian. Taman Pakujoyo dipilih karena perkembangan PKL di taman tersebut cukup pesat sejak Taman Pakujoyo diresmikan pada tahun 2015. Taman Pakujoyo juga terus berkembang hingga menjadi salah satu sarana rekreasi primadona masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Namun, satu hal yang disayangkan adalah Taman Pakujoyo yang seharusnya menjadi salah satu Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Sukoharjo malah menghasilkan banyak sampah hasil dari kegiatan PKL yang tidak menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan. Bahkan menurut salah satu petugas kebersihan Taman Pakujoyo, tiap petugas kebersihan mampu mengumpulkan dan membersihkan sampah hingga seberat dua kilogram dalam satu hari.

3.1 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam melakukan penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data melalui:

- a. Observasi, yakni mengumpulkan data dengan cara mengamati subjek penelitian;
- b. Dokumentasi, yakni mengumpulkan data dengan cara mencatat data yang telah tersedia di kantor-kantor dan instansi-instansi terkait;
- c. Studi pustaka, yakni mengumpulkan data dengan cara mencari dari buku, jurnal, dan publikasi lainnya;
- d. Wawancara, yaitu mencari data dengan menanyakan langsung kepada narasumber (PKL).

3.2 METODE ANALISIS DATA

Dalam melakukan penelitian ini, metode penelitian yang diterapkan yaitu deskriptif kualitatif. Metode deskriptif menurut Sugiyono (2012) merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis atau untuk memberikan gambaran mengenai suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Metode kualitatif menurut Sulistyono (2015) digunakan untuk analisis data yang terkumpul yaitu sekunder maupun primer yang dilakukan dengan menjelaskan atau mendeskripsikan dan melakukan pembuktian terhadap yang ditemukan dalam penelitian. Metode ini dipilih karena objek penelitian yang diambil, yaitu para PKL di Taman Pakujoyo, merupakan fenomena sosial ekonomi yang perolehan datanya diambil berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk menata dan mengelola para PKL Taman Pakujoyo. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data kualitatif sehingga analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

3.3 VARIABEL

Berdasarkan pembahasan teori pada subbab sebelumnya, ditetapkan bahwa terdapat empat indikator dari variabel aspek sosial dan tiga indikator dari aspek ekonomi pada variabel yang dapat ditinjau pada Tabel 2.

Tabel 2. Variabel dan Indikator dalam Penelitian

Variabel	Indikator
Aspek sosial	Adanya kebijakan terkait sektor informal PKL Adanya paguyuban atau komunitas antarpelaku PKL Adanya hubungan timbal balik antarpelaku PKL Adanya hubungan timbal balik antarpelaku PKL dengan pemerintah
Aspek ekonomi	Adanya pembinaan bagi PKL Adanya peningkatan pendapatan PKL setelah penataan Adanya bantuan atau kemitraan usaha bagi PKL

Sumber: Sutrisno et al. (2007) dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (2020)

3.4 RUANG LINGKUP WILAYAH

Penetapan ruang lingkup wilayah dilakukan berdasarkan batas Taman Pakujoyo yang dapat ditinjau lebih jelas pada Gambar 1 s.d. Gambar 3. Gambar 1 dan Gambar 2 merupakan peta yang menggambarkan area dan batas area Taman Pakujoyo. Lokasi Taman Pakujoyo berada Kabupaten Sukoharjo, di tengah-tengah permukiman dan berdekatan dengan area pertanian. Lahan ini pada awalnya adalah area pertanian seperti area lain yang berada di dekatnya. Namun, karena lahan ini tidak memiliki produktivitas untuk menghasilkan hasil pertanian atau tanaman pangan, maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo merubahnya menjadi sarana rekreasi dan RTH Taman Pakujoyo. Gambar 3 menunjukkan area tempat berdagang para PKL yang ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Lokasi area PKL ini berada di bagian barat Taman Pakujoyo dan penetapan area PKL ini diharapkan mampu mengendalikan dan menata para PKL yang ada sehingga tidak mengganggu sirkulasi dan fungsi Taman Pakujoyo yang seharusnya menjadi sarana rekreasi dan ruang terbuka hijau bagi masyarakat Kabupaten Sukoharjo.



Gambar 1. Lokasi. Taman Pakujoyo



Gambar 2. Kawasan Taman Pakujoyo



Gambar 3. Lokasi Area PKL Setelah Penataan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Taman Pakujoyo merupakan taman kota yang terletak di Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, yang diperuntukkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa taman kota. Taman Pakujoyo dibangun di atas tanah seluas 4.371 m² yang terletak di koordinat 7°41'19.9" Lintang Selatan dan 110°50'57.1" Bujur Timur. Pada awalnya, lahan tersebut merupakan bekas lahan pertanian, akan tetapi karena melihat kondisi tanah yang kurang subur dan produktif untuk menghasilkan produk pertanian, pemerintah setempat mengalihfungsikannya menjadi sebuah RTH. Pembangunan Taman Pakujoyo dimulai dan diresmikan pada tahun 2015. Pengembangan Taman Pakujoyo sempat mengalami hambatan beberapa kali, mulai dari dana pembangunan taman yang terhambat dari pemerintah hingga masalah penyalahgunaan taman oleh remaja yang kurang bertanggung jawab seperti digunakan untuk berbuat mesum, tempat mengonsumsi minuman keras, dan tempat nongkrong anak *punk*. Seiring berjalannya waktu, pemerintah setempat dalam hal ini merupakan Pemerintah Kelurahan Gayam yang didukung langsung oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, mulai fokus kembali dengan pembangunan Taman Pakujoyo dengan mengajak masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam pembangunan taman. Hasilnya, saat ini Taman Pakujoyo memiliki fasilitas yang sangat beragam serta satwa dan tanaman yang berjumlah ratusan (lihat Gambar 4).

Pedagang-pedagang yang dapat dijumpai di pinggir jalan, terutama pada kawasan pasar dan taman, biasa disebut sebagai PKL. Para pedagang ini menawarkan banyak jenis dagangan yang dominan pada bidang kuliner atau makanan. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat sering membeli dagangan para pedagang tersebut sehingga dapat dikatakan masyarakat tidak terlepas dari kehidupan tanpa PKL, begitu pula sebaliknya. Karena Taman Pakujoyo semakin ramai dikunjungi oleh masyarakat dan semakin berkembang pula PKL di sekitar area taman, maka pemerintah setempat menyediakan dan membuat lapak atau area khusus untuk pedagang. Hal tersebut menjadikan area taman lebih baik dan tertata dibandingkan saat awal dibangunnya Taman Pakujoyo tahun 2015. Saat itu, PKL masih memenuhi pinggir jalan dan akses masuk menuju taman sehingga mengakibatkan jalan dan aksesibilitas sekitar taman terganggu. Keberadaan PKL di Taman Pakujoyo merupakan salah satu simbiosis mutualisme dengan pengunjung Taman Pakujoyo. Para pengunjung mendapatkan kenyamanan dalam menggunakan RTH dan pedagang mendapatkan keuntungan dengan menjual dagangannya. Pemerintah melakukan pengaturan terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, dan keindahan area taman. Dilihat dari sisi sosial, keberadaan Taman Pakujoyo membentuk pola perilaku masyarakat dan interaksi yang baru. Mereka mengunjungi taman bersama keluarga. Hal ini menjadikan Taman Pakujoyo memiliki fungsi dalam aspek sosial kemasyarakatan.



Gambar 4. Kondisi Taman Pakujoyo

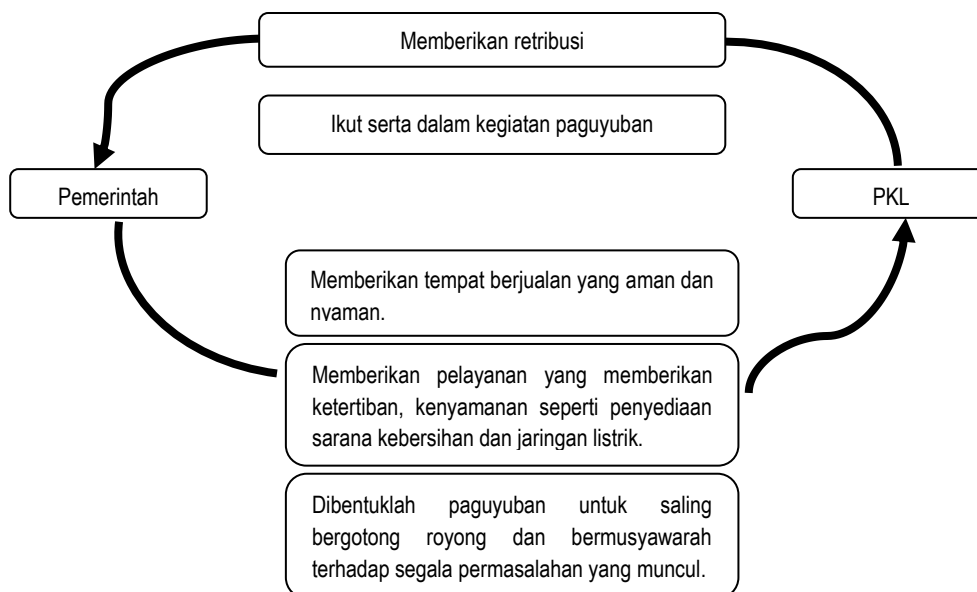


Gambar 5. Kondisi PKL di Taman Pakujoyo

PKL di Taman Pakujoyo kemudian terlihat semakin jelas, banyak, dan bervariasi. Perkembangan ini tentu menimbulkan dampak positif, antara lain menjadi salah satu alasan masyarakat berkunjung ke Taman Pakujoyo sehingga sekarang Taman Pakujoyo menjadi salah satu sarana rekreasi primadona masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Tingkat pendapatan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar Taman Pakujoyo, bertambah dan jumlah pengangguran terbuka berkurang. Namun, pada sisi lain perkembangan ini juga menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif tersebut dapat dilihat dari penuhnya PKL yang menempati ruang kegiatan publik yang jelas bukan merupakan peruntukannya, seperti di pinggir jalan ataupun pinggiran trotoar bahkan badan jalan, menurunnya kualitas lingkungan akibat sampah yang dihasilkan, kemacetan lalu lintas yang dihasilkan, dan pencemaran udara. Dampak-dampak negatif dapat dikendalikan dengan melakukan penertiban dan penataan terhadap PKL. Inilah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan membangun area khusus yang menjadi tempat para PKL berjualan, tepatnya di sisi barat Taman Pakujoyo (lihat Gambar 5). Hal ini ditujukan untuk menjaga kesehatan lingkungan Taman Pakujoyo dan sekitarnya serta menciptakan area yang aman untuk tempat usaha bagi para PKL.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima PKL di Taman Pakujoyo, penataan pedagang yang berada di Taman Pakujoyo memang terbukti mampu mengendalikan para PKL yang membuka lapak di pinggir jalan dan memperlancar akses masuk menuju taman. Berdasarkan aspek sosial, pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan untuk mengatur PKL yang berada di Taman Pakujoyo seperti kebijakan area mana saja yang diperbolehkan untuk menjadi tempat usaha, sarana-sarana apa saja yang disediakan oleh pemerintah dan dapat dimanfaatkan oleh PKL, serta jam buka dan jam tutup operasional pedagang kaki lima, kebijakan untuk selalu menjaga kebersihan, dan peraturan untuk menjaga kondusifitas Taman Pakujoyo bagi pedagang, pengunjung, serta seluruh elemen masyarakat. Selain itu, dampak lain dari penataan PKL ini adalah terbentuknya Paguyuban Pedagang Pakujoyo (P3) Gayam. Paguyuban tersebut merupakan wadah untuk berbagi aspirasi dan kerja sama antar PKL, PKL dengan pemerintah, dan menjadi wadah untuk bergotong-royong serta sebagai langkah awal kemajuan untuk menciptakan kemampuan pengelolaan atau manajerial PKL yang baik. Dengan adanya paguyuban tersebut, terlaksana berbagai kegiatan sosial dan kerja sama yang dilakukan para PKL seperti kerja bakti, dana kasih, arisan rutin, atau bentuk kerjasama permodalan yang lain. Berdasarkan informasi dari PKL yang diwawancarai terkait keikutsertaan dalam kegiatan paguyuban, didapatkan bahwa semua PKL tersebut ikut dan terlibat aktif dalam kegiatan paguyuban. Gambar 7 menunjukkan persentase keikutsertaan dan keterlibatan aktif PKL dalam kegiatan paguyuban.

Hubungan timbal balik PKL dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah para PKL menyetujui adanya penarikan retribusi seperti retribusi listrik, kebersihan, dan lapak oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sebagai gantinya, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo harus mampu melindungi dan membina para PKL yang ada di Taman Pakujoyo. Hubungan timbal balik antara PKL dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat melalui Gambar 6.



Gambar 6. Hubungan antara Pemerintah dengan PKL

Hasil wawancara dengan PKL juga menunjukkan bahwa para PKL cukup puas dengan adanya penataan area khusus PKL. Mereka menyebutkan bahwa setelah penataan, mereka merasa lebih aman dan nyaman dalam berjualan. Ketersediaan sarana penunjang lain yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo seperti penyediaan jaringan listrik juga sangat mendukung dan memudahkan PKL dalam menjalankan dan meningkatkan kegiatan usahanya. Dengan tersedianya tempat dan sarana usaha yang mumpuni, kegiatan usaha menjadi semakin efektif. Salah satu hasil yang dapat dilihat dari semakin efektifnya kegiatan usaha para PKL adalah meningkatnya pendapatan mereka. Meskipun sempat mengalami penurunan karena adanya pandemi Covid-19 yang menjadikan semua kegiatan termasuk kegiatan usaha harus dibatasi, kegiatan usaha PKL kembali normal setelah beberapa waktu. Namun, beberapa PKL menyebutkan bahwa pada awal penataan dilakukan, terutama pada pembagian lapak, terdapat sebagian PKL yang saling berebut lapak dengan lokasi strategis karena akan mempengaruhi jumlah pendapatan mereka. Pada saat inilah paguyuban dan pemerintah bertindak sebagai pihak penengah dalam pembagian lapak antarpedagang sehingga dapat dihasilkan keputusan bersama. Gambar 7 menunjukkan dokumentasi sesi wawancara bersama dengan PKL.



Gambar 7. Wawancara dengan PKL di Taman Pakujoyo

Berdasarkan aspek ekonomi dari hasil wawancara dengan lima PKL, telah dilaksanakan pembinaan kepada para PKL berupa penyuluhan untuk menjaga kerukunan antarpedagang serta pembinaan untuk memajukan pengelolaan atau manajerial Taman Pakujoyo agar lebih baik. Selain itu, setelah adanya penataan, seluruh PKL mengalami peningkatan pendapatan walaupun sempat menurun dikarenakan wabah pandemi Covid-19. Sayangnya, P3 Gayam belum pernah menerima bantuan atau program kemitraan. Hal ini dikarenakan mereka perlu mengajukan proposal bantuan ke Pemerintah Kelurahan Gayam atau Kecamatan Sukoharjo terlebih dahulu dan hingga saat ini proposal tersebut masih dalam tahap pembahasan. Meski demikian, telah terdapat bantuan bersifat individu seperti sembako dan bantuan untuk mengelola taman kepada para PKL. Ke depannya, P3 Gayam merencanakan untuk mengusahakan bantuan dan kemitraan dengan pihak luar untuk mengembangkan area dan sarana PKL yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap narasumber, didapatkan hasil bahwa 60% narasumber memiliki pekerjaan lain selain menjadi PKL. Dari hasil persentase tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam kegiatan ekonomi dan memenuhi kebutuhannya beberapa PKL masih perlu mengambil pekerjaan lain selain PKL. Hal ini juga menunjukkan bahwa bekerja sebagai PKL di Taman Pakujoyo masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini juga berarti bahwa penataan area PKL belum mampu membantu memberikan dampak bagi sebagian PKL untuk meningkatkan perekonomiannya

5. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

- a. Penataan Taman Pakujoyo terbukti efektif dan membawa banyak dampak positif seperti tertatanya taman, meningkatnya pendapatan PKL, dan terbentuknya paguyuban PKL. Penataan PKL ini merupakan wujud kesesuaian dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 05 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- b. Penataan ini mampu memberikan keamanan dan kenyamanan kepada PKL dalam berjualan sehingga mereka dapat berjualan dengan lebih baik dan tenang. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya pendapatan yang mereka terima setelah penataan;
- c. Para PKL merasakan kepuasan dari hasil penataan PKL. Sebagai timbal baliknya, mereka mengikuti kegiatan penyuluhan dan paguyuban dengan tertib. Selain itu, mereka juga melakukan pembayaran retribusi secara teratur;

- d. Meskipun telah dilakukan penataan sehingga meningkatkan pendapatan, beberapa PKL masih harus mengambil pekerjaan lain. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan yang mereka terima sebagai penjual PKL masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan, saran yang dapat dipertimbangkan antara lain:

- a. Untuk mengatasi permasalahan terkait konflik akibat pembagian luas lapak yang akan diberikan kepada PKL, diharapkan terdapat sosialisasi yang efektif dan melibatkan seluruh PKL dan stakeholder lain;
- b. Dalam pembagian lapak terdapat sebagian PKL yang berebut ingin mendapatkan lapak dengan lokasi strategis karena dapat mempengaruhi pendapatan mereka. Untuk mengatasi hal tersebut, akan lebih baik jika para PKL dapat menempati berbagai lapak yang ada dengan cara dilakukan pergiliran penggunaan lapak oleh PKL. Selain memberikan kesempatan kepada para PKL untuk merasakan berjualan di lapak yang strategis maupun tidak, hal ini juga dapat mencegah adanya perasaan iri antar PKL yang nantinya dapat menimbulkan perpecahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Banks, N., Lombard, M., & Mitlin, D. (2020). Urban Informality as A Site of Critical Analysis. *Journal of Development Studies*, 56(2), 223–238. <https://doi.org/10.1080/00220388.2019.1577384>
- Bromley, R. (1979). *Organisasi, Peraturan, dan Pengusahaan Sektor informal di Kota Pedagang Kaki Lima di Cali Colombia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Budiman, B. (2010). *Kajian Lingkungan Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Banjaran Kabupaten Tegal*. Universitas Diponegoro.
- Djojodipuro, M. (1992). *Teori Lokasi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- Effendi, T. N. (1993). *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Faradina, N. (2019). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Daerah Tujuan Pariwisata*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia.
- Hart, K. (1973). Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana. *The Journal of Modern African Studie*, 11(1), 61–89. Diakses dari: <https://www.jstor.org/stable/159873>
- Lausiry, M. N., & Tumuka, L. (2019). Analisis Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat Migran Sebelum dan Sesudah Berada di Kota Timika. *Jurnal Kritis (Kebijakan, Riset, Dan Informasi)*, 3(1), 1–23. Diakses dari: <http://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/view/43>
- Manning, C., & Effendi, T. N. (1995). *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. (2020). *Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 05 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*.
- Rachbini, D. J., & Hamid, A. (1994). *Ekonomi Informal Perkotaan: Gejala Inovasi Gelombang Kedua*. Jakarta: LP3ES.
- Rusito, F. N. A., Suaib, H., & Hidayat, N. (2017). Pola Kehidupan Masyarakat Pedagang Kaki Lima di Kota Sorong (Studi pada Kehidupan Sosial Masyarakat Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Kampung Baru). *Jurnal Faksi: Fase Kemajuan Sosial Dan Politik*, 3(1), 1–14. Diakses dari: <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jf/article/view/671>
- Saputra, R. B., & Indrawati. (2014). Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) yang Berjualan di Badan Jalan (Studi di Jalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 1(2), 1–15. Diakses dari: <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/3122>
- Sinaga, S. (2004). *Dampak Sosial Kebijakan Pemda DKI Jakarta tentang Relokasi Pedagang Kaki Lima di Lokasi Binaan Studi Kasus di Lokasi Binaan Paal Merah Jakarta Pusat*. Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia.
- Soleh, A., & Daniel, P. A. (2019). Analisis Sektor Usaha Informal di Kota Jambi. *Jurnal Development*, 7(1), 1–7. <https://doi.org/10.53978/jd.v7i1.125>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sulistiyono. (2015). *Studi Kualitatif Deskriptif Perilaku Konsumen Rilis Fisik Vynil di Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sutrisno, B., Suwandi, J., & Sundari. (2007). Pola Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surakarta Berdasar Paduan Kepentingan PKL, Warga Masyarakat, dan Pemerintah Kota. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 8(2), 166–175. Diakses dari: <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/584>